

KONTRIBUSI KAWASAN HUTAN DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN: STUDI KASUS PROPINSI JAWA BARAT (*Contribution of Forest Area in Supporting Food Security: Case Study of West Java Province*)

Oleh/By :

Hariyatno Dwiprabowo, Rachman Effendi, Ismatul Hakim & Indah Bangsawan

Pusat Penelitian Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor - Telp. (0251) 8633944 Fax. (0251) 8634924

Email: hwdwiprabowo@telkom.net., Ismatulhakim@yahoo.com, rch_effendi@yahoo.com

ABSTRACT

Food security is the condition of the fulfillment of food for households as reflected in the availability of sufficient quantity and quality, safe, equitable and affordable. Due to its importance, government has declared that food security as obligatory undertakings in its administration as stipulated in Government Regulation number 38 of 2007. Forest lands traditionally have been known as source of non wood forest products including food for people living in surrounding forests. Perum Perum Perhutani as a sole forest state enterprise in Java has adopted strategic policy to involve villagers in managing its plantation forests in which villagers are allowed to grow food and perennial crops (mainly food crops) in between planted trees and are given full right to harvest all the yield. As this policy (known with acronym PHBM) has proceeded for several years, all new forest plantations in Java has implemented the PHBM. This study is aimed to find out the share of forest lands managed under PHBM scheme to food production in general in comparison with agricultural lands. The study is conducted in West Java Province. Data were collected mainly secondary data from Perum Perum Perhutani, Food Crops, and other offices in Sukabumi and Bandung Barat regencies, West Java province. The study showed that food crops (paddy rice, corn and beans) production from forests fluctuating year by year, in total the share of food production from forests was less than one percent of total food production. In order to improve its share and sustainability, measures to increase the spaces between trees and introduction of crops variety that can increase yields need to be adopted. Long term collaboration between Forestry services, Perum Perum Perhutani, and Agriculture services, and Food Security Agencies should be strengthened to achieve the goal.

Keywords: Food security, forest lands, forest management with communities

ABSTRAK

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari kecukupan persediaan, baik jumlah maupun mutunya, aman merata dan terjangkau. Mengingat esensialnya masalah ketahanan pangan, pemerintah telah menetapkan bahwa ketahanan pangan sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007. Kawasan hutan secara tradisional diketahui sebagai penghasil hasil hutan bukan kayu termasuk bahan pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Perum Perum Perhutani dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa telah menerapkan kebijakan strategis berupa Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak beberapa tahun yang lalu yang membolehkan masyarakat untuk menanam palawija maupun tanaman tahunan di antara pohon yang ditanam. Dalam pola tersebut masyarakat diperbolehkan menanam palawija di antara tanaman

kayu dan mendapat seluruh bagian dari hasil tersebut. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejauhmana kawasan hutan memberikan kontribusinya pada ketahanan pangan. Kontribusi tersebut dilihat dari pangsa (*share*) volume produksi komoditas pangan (padi, jagung, dan kacang-kacangan) terhadap total produksi wilayah. Lokasi penelitian adalah Provinsi Jawa Barat dengan sampel lapangan di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Sukabumi. Pengumpulan data dan wawancara dilakukan pada Perum Perum Perhutani, Dinas Tanaman Pangan dan instansi lainnya untuk memperoleh data dan mengetahui kebijakan masing-masing instansi terkait dengan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi pangan dari kawasan hutan cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara total kontribusi produksi komoditas pangan (padi, jagung, kacang-kacangan) dari kawasan hutan menyumbang kurang dari satu persen dari total produksi Provinsi Jawa Barat. Peluang meningkatnya kontribusi tersebut masih terbuka dengan berbagai kebijakan strategis dan teknis. Kebijakan teknis berupa meningkatkan jarak tanam dan introduksi varietas unggul. Kerjasama jangka panjang antara Dinas Kehutanan, Perum Perum Perhutani, Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata kunci: Ketahanan pangan, kehutanan, pengelolaan hutan bersama masyarakat

I. PENDAHULUAN

Hutan selain sebagai sumber daya potensial, juga merupakan sumber pangan, obat-obatan, energi, sandang, lingkungan dan sekaligus tempat tinggal masyarakat. Untuk itu sistem pengelolaan hutan, masyarakat mengelola lahannya dengan pola perladangan untuk ditanami pohon serta pada lantai hutan ditanami dengan tanaman pangan (palawija) dan obat-obatan. Masyarakat dalam memanfaatkan hasilnya selain untuk pangan dan obat-obatan, juga sebagai bahan baku sandang, sehingga hutan dijadikan sebagai sumber ekonomi.

Pengelolaan sumber daya hutan ke depan, dituntut untuk lebih memperhatikan keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, sebagai indikator pengelolaan sumber daya hutan lestari (*sustainable forest management*). Adanya pergeseran paradigma dan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) juga menjadi pemicu dan pendorong adanya pergeseran sistem pengelolaan hutan dari yang sudah dipraktekkan sebelum era reformasi dan desentralisasi pemerintahan. Pengelolaan dengan kaidah kelestarian dalam pelaksanaannya harus memandang hutan sebagai satu kesatuan ekosistem, lengkap dengan keanekaragaman hayati yang dikandungnya. Berbagai bentuk pengelolaan hutan di tanah air seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, bahkan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dengan pohon kehidupannya beberapa tahun terakhir ini telah mulai mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan pangan. Di Pulau Jawa selama beberapa tahun terakhir ini Perum Perum Perhutani sebagai pengelola hutan produksi telah menerapkan pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai strategi pengelolaan hutan. Luas hutan di wilayah kerja Perum Perhutani adalah 2,5 juta ha di mana 68,7% berada dalam wilayah administrasi Desa Hutan sehingga PHBM telah diterapkan di sebagian besar wilayah kerja Perum Perum Perhutani (Irawanti, 2009).

Kontribusi aktual dan potensial dari hutan dan pohon-pohonan terhadap ketahanan pangan dan mata pencaharian cenderung diabaikan oleh pembuat kebijakan.

Situasi ini disebabkan cukup dominannya informasi tentang tanaman pangan dan ternak dari sektor pertanian dan/atau pandangan yang sempit atas peran sektor kehutanan (FAO, 2010).

Ketahanan pangan menyangkut terpenuhinya pangan masyarakat rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai serta merata, aman dan terjangkau. Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan (*availability*), stabilitas (*stability*), keterjangkauan (*accessibility*) dan kualitas (*quality*) (FAO, 2003). Ketahanan pangan ini perlu didukung oleh kebijakan pengelolaan oleh sektor kehutanan, sehingga ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan dengan impor.

Melalui Peraturan Pemerintah ketersediaan pangan dan kecukupan pangan bagi rakyat dalam rangka ketahanan pangan nasional mendapat perhatian besar. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri. Selama ini kontribusi hutan terhadap ketersediaan pangan nasional sudah cukup besar. Hutan sebagai penyangga sistem kehidupan (*life supporting system*) mempunyai kemampuan untuk mendukung penyediaan pangan. Jenis-jenis pangan yang dihasilkan dari kawasan hutan diantaranya adalah: padi, jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian dan buah-buahan, serta produk hewani dari satwa hutan yang ada dalam bentuk madu dan daging.

Makalah ini bertujuan untuk mengemukakan hasil kajian atas sumbangan kawasan hutan dalam menunjang ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan untuk meningkatkan kontribusi tersebut.

II. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kasus untuk melihat seberapa besar kontribusi sektor kehutanan dalam hal ini program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) terhadap ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat, kedua lokasi tersebut dipilih dengan mempertimbangkan keberhasilan dan kelemahan dari Program PHMB yang telah dilakukan, serta ketergantungan masyarakat akan hasil produksi pangan yang bersumber dari dalam kawasan hutan. Kabupaten Sukabumi sebagai sampel bentuk pengelolaan PHBM yang memiliki manajemen cukup baik, sedangkan Kabupaten Bandung Barat sebagai sampel pengelolaan PHBM yang masih perlu dikembangkan.

Perolehan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur, observasi dilapangan dan studi literatur. Perolehan data tersebut melibatkan beberapa responden, yaitu Perum Perhutani Unit III Jawa Barat: Kesatuan Pemangku Hutan Bandung Utara, Bandung Selatan dan Sukabumi, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Data yang diperoleh meliputi data hasil produksi komoditi pangan yang ditanam di lahan perum Perum Perhutani, data tingkat konsumsi pangan masyarakat peserta program PHBM, luasan lahan yang ditanami komoditi pangan, kondisi umum lokasi penelitian dan lain-lain. Data yang diperoleh diolah dengan melakukan tabulasi data, untuk selanjutnya dianalisis

secara kualitatif dengan metedo deskriptif. Analisis tersebut dilakukan dengan memperhatikan parameter ketahanan pangan mencakup: ketersediaan, stabilitas, keterjangkauan dan kualitas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Umum

Meningkatnya produksi pangan dari kawasan hutan produksi di Pulau Jawa disebabkan oleh terbangunnya kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa sekitar hutan (desa hutan) melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dari sisi Perum Perhutani, kebijakan tersebut dianggap perlu untuk meningkatkan keamanan hutan dari pencurian kayu namun hal tersebut tidak terlepas dari faktor pendorong tambahan seperti meningkatnya kepadatan penduduk memberi tekanan pada kebutuhan lahan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan pangan. Kemitraan tersebut berangsur-angsur mendapat dukungan dari pemerintah daerah kabupaten dan provinsi. Kondisi ini disebabkan kinerja pemerintah daerah diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) yang terdiri dari: (1) Tingkat pendidikan masyarakat, (2) Tingkat kesehatan masyarakat, dan (3) Tingkat daya beli masyarakat. Dalam hal ini kemitraan melalui PHBM dianggap menunjang tingkat daya beli masyarakat.

Kontribusi sektor kehutanan terhadap ketahanan pangan dapat dilihat dari kontribusi kawasan hutan dalam penyediaan pangan. Di Pulau Jawa, seluruh hutan produksinya berada dibawah pengelolaan Perum Perhutani dimana pendekatan pengelolaan hutan memiliki potensi untuk menunjang ketahanan pangan di wilayah tersebut. Sejak tahun 2001 Perum Perhutani telah mengambil langkah strategis dalam pengelolaan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat, program ini selanjutnya disebut PHBM. Dalam program ini tanaman pangan dihasilkan dari kegiatan tumpang sari pada saat dimulainya penanaman pohon. Program PHBM di Kabupaten Sukabumi dimulai sejak tahun 2005 dengan dasar hukum SK Direksi Perum Perum Perhutani No. 136 Tahun 2001 tentang PHBM dan Perda Kabupaten Sukabumi No. 13 Tahun 2003 tentang PHBM. Seiring dengan adanya keputusan-keputusan tersebut maka mulailah dibentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang dimulai sejak tahun 2005 sampai tahun 2008. LMDH-LMDH inilah yang mewadahi masyarakat sekitar hutan dalam rangka keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan pola tumpangsari, di mana masyarakat dapat menanam tanaman pangan (salah satu tanaman yang ditanam) di antara pohon.

Target kegiatan tumpangsari ini dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) tahun, dimana dalam waktu tersebut tajuk tanaman kayu belum menaungi tanaman pangan. Setelah usia tanaman kayu lebih dari 3 (tiga) tahun maka kegiatan tumpangsari sudah tidak dapat dilakukan lagi karena lahan sudah tertutupi oleh tajuk tanaman kayu. Pada saat tersebut tanaman yang dikembangkan selanjutnya adalah kapulaga dan iles-iles yang tahan terhadap naungan. Kegiatan tumpangsari terus berlanjut namun berpindah ke lokasi lain di mana kegiatan penanaman kayu juga mulai dilakukan. Kegiatan tumpangsari juga akan

terus berjalan, mengingat program penanaman pohon kayu berlangsung terus- menerus dan akan berjalan dari tahun ke tahun. Dengan adanya kegiatan tumpangsari inilah masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan akan pangannya. Hasil dari tumpangsari belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan pangan keluarga masyarakat sekitar hutan dapat dipenuhi dari kegiatan tumpangsari yang dilakukan.

Kemitraan antara Perum Perum Perhutani dengan LMDH ditetapkan dengan Akte Notaris yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dari sisi kelembagaan program ini memiliki basis yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang.

B. Kontribusi Kawasan Hutan

1. Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat

Kontribusi kawasan hutan untuk tanaman pangan bervariasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya tergantung pada kondisi wilayah masing-masing. Pada dasarnya variasi terletak pada jenis tanaman pertanian yang ditanam apakah tanaman pangan atau tanaman tahunan, disesuaikan dengan kondisi fisik lapangan serta aspirasi masyarakat setempat. Meskipun peran masyarakat cukup besar dalam PHBM namun aspirasi masyarakat dalam memilih suatu jenis tidak selalu disetujui oleh pihak pengelola hutan karena pertimbangan fisik lapangan.

Bahan pangan yang dihasilkan masyarakat dari program PHBM melalui kegiatan tumpangsari pada umumnya adalah: padi, jagung, kacang-kacangan, ubi kayu dan ubi jalar. Hasil padi di kawasan yang berupa sawah rata-rata 2 ton per hektar sedangkan di lahan kering sekitar 1,5 ton per hektar. Adapun jenis pangan yang dihasilkan dan besarnya jumlah produksi hasil panen per tahun di KPH Sukabumi dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 1. Jenis dan produksi pangan di KPH Sukabumi Tahun 2005 - 2009
Table 1. *Food crops production from KPH Sukabumi in 2005-2009*

No	Jenis Pangan (Food crop)	Satuan (Unit)	Produksi dan nilai pada tahun (Production and values in year)				
			2005	2006	2007	2008	2009
1.	Padi (Rice)	ton Rp	1.09 1.498.780.000	7.206 9.943.720.000	12.732 17.949.369.800	7.742 10.073.531.500	4.241 7.633.332.000
2.	Jagung (Corn)	ton Rp	518,75 142.656.250	3.033 834.057.455	3.889 972.206.250	3.371 530.914.000	632 316.000.000
3.	Kacang Kedelai (Soy bean)	ton Rp	N/A	N/A	2.363 4.174.705.475	14 34.865.500	N/A
4.	Kacang Tanah (Peanut)	ton Rp	746,35 1.921.104.900	204 523.780.000	6.570 9.855.294.000	2.289 5.894.561.250	4.182 10.455.000.000
5.	Ubi Kayu (Cassa-va)	ton Rp	2,8 700.000	21.578 5.153.888.284	1 250.000	15.551 7.954.315.850	5.095 2.547.500.000
6.	Lainnya (Others)	ton Rp	59,5 193.375.000	8.805 4.657.096.600	56 363.750.000	434 338.000.000	1.795 1.647.500.000

Sumber (Source): KPH Sukabumi, 2010. Data diolah (Data processed). N/A: Data tidak tersedia (Data not available)

Dalam operasionalnya, beberapa kelompok tani pada kegiatan PHBM di Kab. Sukabumi ini mendapat bantuan langsung dari instansi kehutanan dan non kehutanan. Bantuan yang diterima berbagai macam, baik dalam bentuk bantuan benih (padi dan jagung), ternak (kambing dan sapi), peralatan pertanian, stup madu, bibit kapulaga dan karet, jamur, hingga modal usaha (bergulir). Namun demikian bantuan ini belum merata pada seluruh kelompok tani yang ada. Bantuan-bantuan tersebut juga menambah kemampuan masyarakat (terutama kelompok yang menerima bantuan) untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarganya sehari-hari.

Untuk meningkatkan peran PHBM dalam penyediaan pangan pihak pengelola kawasan telah mengadakan tambahan opsi pada jarak tanam tanaman pohon untuk menambah kegiatan tumpangsari. Tambahan opsi ini diharapkan kegiatan tumpangsari yang di antaranya menanam tanaman pangan dapat berlangsung dalam waktu yang lebih lama dengan jumlah yang lebih banyak (karena lahan di antara tegakan lebih luas). Hal ini dapat dilakukan karena lahan di bawah tegakan akan lebih lama terbuka dan tidak tertutup oleh tajuk tanaman kayu yang merupakan tanaman utama. Adapun perkembangan jarak tanam pohon yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- Jarak tanam 3 x 2 m dan 3 x 1 m sebelum tahun 2000
- Jarak tanam 3 x 2 m dan 3 x 3 m setelah tahun 2000
- Jarak tanam 6 x 1 m mulai tahun 2004/2005
- Jarak tanam 5 x 5 m mulai tahun 2010

Adanya program PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani (KPH Sukabumi) dimana di dalamnya ada kegiatan tumpangsari, bukan saja memberikan manfaat pada masyarakat sekitar hutan, tetapi juga memberikan manfaat lainnya yang lebih besar bagi Perum Perhutani sendiri (manfaat utama sesuai dengan bidang usaha) yaitu berupa tingkat keberhasilan tanam yang tinggi. Dengan tingkat keberhasilan tanaman yang tinggi tentunya menguntungkan Perum Perhutani karena hasil panen kayu akan lebih tinggi dan akhirnya keuntungan Perum Perhutani juga bertambah. Tingkat keberhasilan tanam yang dirasakan oleh KPH Sukabumi ini dapat dilihat pada Tabel 2. Salah satu faktor penting yang menyebabkan tingkat keberhasilan yang tinggi ini adalah partisipasi masyarakat yang tidak saja memperoleh bagian penuh dari hasil tumpangsari, namun juga sebagian hasil kayu di kemudian hari. Menurut Hakim dkk.(2004) bagi hasil program PHBM antara Perum Perum Perhutani dengan masyarakat di Desa Trijaya, Kabupaten Kuningan, bervariasi. Sebagai contoh, bagi hasil penjarangan tanaman pokok (kayu) pada pemeliharaan tegakan adalah 70% : 30%, sedangkan tanaman tahunan 2% : 98%. Untuk kegiatan reboisasi bekas kebakaran, bagi hasil tanaman pokok 30% : 70%, sedangkan tanaman tahunan 5% : 95%.

Tabel 2. Tingkat keberhasilan tanam di KPH Sukabumi Tahun 2004 - 2009
Table 2. Survival rate of tree planting in KPH Sukabumi in 2004 - 2009

No.	Tahun (Year)	Tingkat keberhasilan tanam, % (Survival rate, %)
1.	2004	92,93
2.	2005	96,03
3.	2006	96,58
4.	2007	97,54
5.	2008	97,09
6.	2009	97,17

Sumber (Source): KPH Sukabumi, 2010. Data diolah (Data processed)

Berbeda dengan bentuk topografi di kawasan hutan produksi di Kabupaten Sukabumi yang cenderung landai atau bergelombang maka wilayah kawasan hutan di Kabupaten Bandung Barat (Catatan: Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki KPH sendiri) cenderung memiliki kelerengan yang lebih curam sehingga sebagian besar memiliki fungsi lindung (Hutan Lindung) dan konservasi (Hutan Konservasi). Sebagian kawasan Hutan Produksi memiliki kelerengan yang cukup curam sehingga terkena PERDA Gubernur Jawa Barat sebagai kawasan lindung. Sebagai dampak dari kondisi tersebut program PHBM cenderung menghindari penanaman yang bersifat intensif untuk mengurangi kerusakan lahan hutan. Program PHBM di KPH Bandung Selatan yang sebagian wilayahnya berada dalam Kabupaten Bandung Barat lebih diarahkan pada tanaman hortikultura seperti kopi, MPTS (*Multifurpose Tree Species*) dan karet. Tanaman kopi merupakan produk utama dari PHBM baik yang ditanam pada Hutan Lindung maupun Hutan Produksi Terbatas dengan total produksi pada tahun 2009 sebesar 252 ton (Tabel 3). Tanaman tumpangsari berupa tanaman pangan seperti padi ditanam pada wilayah yang sangat terbatas pada hutan produksi khususnya pada wilayah selatan yang cenderung basah (berawa-rawa) dengan jumlah produksi 110 ton, sedangkan produksi jagung dan kacang-kacangan nihil.

Tabel 3. Jenis dan produksi pangan di KPH Bandung Utara dan Bandung Selatan Tahun 2008 - 2009

Table 3. Crops production from KPH Bandung Utara dan Bandung Selatan in 2008 - 2009

No	Jenis Tanaman (Crops)	Satuan Unit	KPH Bandung Utara		KPH Bandung Selatan		Total	
			2008	2009	2008	2009	2008	2009
1	Padi (Paddy Rice)	ton		-	-	110	-	110
2	Kopi (Coffee)	ton	5	-	242	252	247	252

Keterangan (Remarks): Kabupaten Bandung Barat meliputi sebagian wilayah KPH Bandung Utara dan KPH Bandung Selatan (*Bandung Barat district includes only parts of North dan South Bandung Forest Administration*). N/A: data tidak tersedia (*the data is not available*)

Sumber (Source): Perum Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten

2. Propinsi Jawa Barat

Produksi tanaman pangan khususnya padi gogo dari kawasan hutan (sektor kehutanan) di Propinsi Jawa Barat secara kuantitas mengalami kenaikan secara tajam dari tahun 2006 ke 2007 yaitu dari 46 ribu ton menjadi 64 ribu ton atau sekitar 50%, namun pada tahun 2008 - 2009 mengalami penurunan terus menerus menjadi 51 ribu dan 37 ribu ton (Tabel 4). Produksi jagung pada periode yang sama mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan produksi puncak sebesar 26 ribu ton pada tahun 2008. Kecenderungan volume produksi kacang-kacangan mirip dengan padi gogo yakni mengalami kenaikan dari tahun 2006 sebesar 2,6 ribu ton menjadi 21 ribu ton pada tahun 2007 atau suatu kenaikan sebesar 8 kali lipat, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 18,5 ribu ton dan 9,7 ribu ton. Secara total volume produksi ketiga komoditas pangan tersebut mengalami fluktuasi selama periode tersebut dengan puncak produksi 102 ribu ton pada tahun 2007.

Fluktuasi ini dapat dipahami mengingat berbagai faktor penyebab. Selain faktor luas kawasan hutan Perum Perum Perhutani yang dikerjasamakan dengan desa hutan melalui PHBM berbeda dari tahun ke tahun, pola jarak tanam pada tanaman pohon, faktor lain seperti kualitas bibit, saprodi, dan cuaca ikut mempengaruhi. Kontribusi sektor kehutanan masih sangat kecil dibandingkan tanaman pangan dari lahan pertanian. Jika dibandingkan dengan total produksi pertanian untuk komoditi padi, jagung dan kacang-kacangan di Propinsi Jawa Barat, secara persentase produksi padi gogo yang terendah 0,34% pada tahun 2009 dan yang tertinggi 0,65% pada tahun 2007. Untuk tanaman jagung kontribusi produksi dari lahan hutan selama periode 2006 - 2009 terendah sebesar 0,8% pada tahun 2009 dan 3,9% pada tahun 2008 dari total produksi seluruh Propinsi Jawa Barat (Tabel 5). Secara total volume produksi ketiga komoditas pangan dari kawasan hutan hanya menyumbang kurang dari 1 (satu) persen dari total produksi Propinsi Jawa Barat.

Tabel 4. Kontribusi sektor kehutanan dan pertanian terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Barat tahun 2004-2009
 Table 4. Contribution of forests and agricultural lands on food stock in West Java province in 2004-2009

Sektor (Sector)	Produksi pada tahun (Production in year), ton					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
A. PERTANIAN (Agriculture):						
1. Padi (Rice)	9.602.302	9.787.217	9.418.572	9.914.020	10.111.071	10.924.508
2. Jagung (Corn)	549.441	587.189	573.263	577.513	639.821	787.599
3. Kacang-Kacangan (Beans)	140.763	140.008	129.539	120.938	123.620	165.906
Jumlah A	10.292.506	10.514.414	10.121.374	10.612.471	10.874.512	11.878.013
B. KEHUTANAN (Forest)						
1. Padi (Rice)	N/A	N/A	46.562,94	64.837,58	51.241,56	37.501,14
2. Jagung (Corn)	N/A	N/A	21.946,97	15.478,19	26.566,68	6.765,88
3. Kacang-Kacangan (Beans)	N/A	N/A	2.680,65	21.750,14	18.517,75	9.722,4
Jumlah B	0	0	71.190,56	102.065,91	96.325,99	53.989,42
Jumlah A + B	10.292.506	10.514.414	10.192.564,56	10.714.536,91	10.970.838	11.932.002,42
Kontribusi A terhadap pangan (%)	100,00	100,00	99,30	99,05	99,12	99,55
Kontribusi B terhadap pangan (%)	N/A	N/A	0,70	0,95	0,88	0,45

Sumber (Source): Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat, 2009; Perum Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, 2010. Data diolah (Data processed).
 Keterangan (Remarks): N/A = Data tidak tersedia (Data not available)

Tabel 5. Persentasi kontribusi sektor kehutanan dan pertanian per komoditas pangan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2004-2009
 Table 5. Contribution of forest and agricultural lands to food stock in West Java province in 2004-2009 (in percentage)

Sektor) Sector	Tahun (Year) Percents						Rata-rata
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
A. PERTANIAN (Agriculture):							
1. Padi (Rice)	100,00	100,00	99,51	99,35	99,50	99,66	99,67
2. Jagung (Corn)	100,00	100,00	96,31	97,39	96,01	0,85	81,76
3. Kacang-Kacangan (Beans)	100,00	100,00	97,97	84,76	86,97	94,46	94,03
B. KEHUTANAN (Forest) :							
1. Padi (Rice)	0,00	0,00	0,49	0,65	0,50	0,34	0,33
2. Jagung (Corn)	0,00	0,00	3,69	2,61	3,99	0,85	1,86
3. Kacang-Kacangan (Beans)	0,00	0,00	2,03	15,24	13,03	5,54	5,97
Kontribusi A terhadap pangan (%)	100,00	100,00	99,30	99,05	99,12	99,55	99,503
Kontribusi B terhadap pangan (%)	N/A	N/A	0,70	0,95	0,88	0,45	0,75

Sumber (Source) : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat (2009); Perum Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (2010). Data diolah (Data processed)
 Keterangan (Remarks): N/A = Data tidak tersedia (Data not available)

C. Kebijakan Pangan

1. Kebijakan Pemerintah

Ketahanan pangan adalah masalah esensial sehingga pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai urusan wajib dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf m dalam Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007. Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Pada berbagai provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat telah berdiri Badan Ketahanan Pangan Daerah. Kebijakan Perum Perum Perhutani yang menerapkan PHBM telah mendapat dukungan baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi di Provinsi Jawa Barat. Program ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2006. Hal ini dapat dipahami karena PHBM dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketahanan pangan bersifat kompleks karena menyangkut aspek daya beli masyarakat, ketersediaan pangan, distribusinya dan tingkat konsumsi masyarakat. Pendekatan yang dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah di Provinsi Jawa Barat adalah: (1) Meningkatkan cadangan pangan dengan membangun lumbung pangan khususnya di daerah rawan pangan. Hal ini dilakukan dengan mendorong usaha ekonomi produktif dengan menyalurkan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat; (2) Mendirikan Lembaga Distribusi Pangan di sentra produksi pangan untuk meningkatkan nilai jual hasil pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menunda penjualan hasil jika harga rendah. Dalam hal ini peran tersebut dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang membeli hasil panen dengan suatu harga dasar tertentu; dan (3) Desa Mandiri Pangan yang sedang dirintis yaitu meningkatkan kemampuan desa untuk mencukupi kebutuhan pangan dari sumber sendiri.

2. Kebijakan Pangan Kehutanan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2010-2014, ketahanan pangan merupakan salah satu dari dua prioritas bidang dalam pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Kementerian Kehutanan, 2010). Kebijakan tersebut perlu disertai penyusunan target dan strategi pencapaiannya serta langkah-langkah operasional lapangan. Pulau Jawa yang memiliki kepadatan penduduk dan laju pengurangan lahan pertanian yang tinggi seyogyanya mendapat perhatian khusus. Perum Perum Perhutani sebagai pengelola tunggal hutan produksi di Pulau Jawa telah melakukan PHBM namun dengan ditetapkan prioritas kebijakan ketahanan pangan Kementerian Kehutanan maka perlu dilakukan harmonisasi. Faktor utama yang mendorong Perum Perum Perhutani untuk mengadakan PHBM adalah untuk pengamanan hutan produksi sehingga pertimbangan ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama sedangkan produksi pangan merupakan tujuan sekunder yang sepenuhnya merupakan upaya masyarakat. Kebijakan ke depan adalah bagaimana mendorong produksi yang stabil dengan kecenderungan yang meningkat dalam penyediaan pangan tanpa mengabaikan tujuan perusahaan.

Ketahanan pangan di Kabupaten Sukabumi dicapai bukan hanya melalui ketersediaan tetapi juga stabilitas, keterjangkauan, dan kualitas, sehingga produk pangan dari kabupaten ini banyak dipasok ke kabupaten lainnya di wilayah Jawa Barat. Ketahanan pangan di Kab. Sukabumi dapat juga ditopang oleh sektor kehutanan dengan adanya program kegiatan PHBM yang dilaksanakan oleh Perum Perum Perhutani dengan melibatkan masyarakat.

Berbeda halnya dengan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung Barat, dimana ketahanan pangannya masih rendah sehingga kebutuhan pangan kabupaten ini masih dipasok dari luar kabupaten. Program kegiatan PHBM yang dilakukan Perum Perum Perhutani pun belum cukup memberikan kontribusi yang memadai dalam rangka ketahanan pangan. Hal ini karena terbatasnya lahan yang dapat dikelola oleh masyarakat untuk kegiatan tumpangsari yang di dalamnya ada penanaman tanaman pangan. Kegiatan penanaman tanaman pangan yang dilakukan oleh masyarakat juga hanya terbatas pada lahan yang terintegrasi saja atau lahan yang tidak dapat ditanami oleh tanaman kayu (pohon kayu).

Program PHBM yang telah ditetapkan sebagai kebijakan strategis Perum Perum Perhutani di P. Jawa ditetapkan oleh Direksi Perum Perhutani. Pola ini telah mendapat dukungan secara luas di tingkat bupati maupun gubernur mengingat program tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Untuk melanggengkan pola ini di masa mendatang perlu ditetapkan kebijakan menteri (kehutanan dan atau BUMN) sehingga memiliki kekuatan tetap yang lebih tinggi dalam meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap ketersediaan pangan.

Kebijakan teknis seperti pola tanam tanaman kayu perlu didesain sehingga memberikan ruang maupun waktu yang lebih panjang bagi penanaman tanaman pangan. Kebijakan teknis ini meskipun masih bersifat local (di KPH Sukabumi) yang meningkatkan jarak tanam pohon menjadi 5 m x 5 m merupakan kecenderungan yang positif dan oleh karena itu perlu diperluas.

Dari sisi kelembagaan maka kerjasama antar instansi terkait dalam masalah ini Perum Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten yang secara insidental telah berjalan di Provinsi Jawa Barat perlu ditingkatkan terutama yang terkait dengan penyediaan sarana produksi. Peningkatan kualitas bibit padi dan jagung serta tanaman palawija lainnya dapat meningkatkan produksi, oleh karena itu keterlibatan institusi penelitian perlu dirintis. Sebagai contoh, menurut sumber dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, saat ini sedang dilakukan program pengembangan padi gogo, dengan introduksi padi gogo unggul plus input teknologi maka diharapkan dapat menghasilkan padi gogo sekitar 6 ton/ha/musim. Angka ini jauh diatas produksi rata-rata pada wilayah PHBM yang menjadi lokasi penelitian yang berkisar antara 3,1 ton hingga 4,6 ton per ha/musim.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil kajian adalah sebagai berikut:

1. Sektor kehutanan, melalui pengelolaan kawasan hutan seperti PHBM oleh Perum Perum Perhutani, telah memberi kontribusi terhadap penyediaan pangan khususnya pada desa-desa sekitar hutan. Kebijakan PHBM ini bersifat strategis dan jangka panjang sehingga kontribusi sektor kehutanan terhadap penyediaan pangan diharapkan bersifat langgeng.
2. Program PHBM telah mendapat dukungan dari para pihak khususnya Pemerintah Daerah dengan adanya Perda Kabupaten tentang PHBM seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Program ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2006.
3. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Sukabumi lebih banyak memberikan kontribusi pangan dibandingkan di Kabupaten Bandung Barat. Hal ini disebabkan oleh kondisi topografi kawasan hutan di wilayah masing-masing. Pada wilayah dengan kelerengan curam seperti di Kabupaten Bandung Barat kegiatan tumpangsari dengan tanaman pangan dibatasi karena memerlukan pengolahan tanah yang intensif; sebaliknya tanaman hortikultura lebih dianjurkan.
4. Kontribusi sektor kehutanan masih sangat kecil dibandingkan tanaman pangan dari lahan pertanian; di samping itu produksinya cenderung fluktuatif. Secara persentase kontribusi produksi padi gabah berkisar yang terendah 0,34 % pada tahun 2009 dan yang tertinggi 0,65% pada tahun 2007. Untuk tanaman jagung kontribusi produksi dari lahan hutan selama periode 2006 - 2009 terendah sebesar 0,8% pada tahun 2009 dan tertinggi 3,9% pada tahun 2008 dari total produksi seluruh Propinsi Jawa Barat. Secara total volume produksi ketiga komoditas pangan dari kawasan hutan menyumbang kurang dari satu persen dari total produksi Propinsi Jawa Barat.
5. Kawasan hutan belum memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap ketahanan pangan daerah karena kegiatan tumpangsari bersifat terbatas pada saat penanaman tanaman kayu (pohon), di samping itu aturan jarak tanam membatasi areal yang tersedia bagi kegiatan tumpang sari.
6. Kebijakan pengelolaan ketahanan pangan perlu ditangani oleh lembaga tersendiri sehingga pelaksanaannya lebih terfokus dan efektif. Stabilitas jangka panjang diperlukan untuk melindungi produksi lokal baik di Kabupaten Sukabumi maupun Bandung Barat, dengan memperluas jaringan pemasaran, pemanfaatan produk lokal, dan pengembangan teknologi pasca panen.

B. Saran

1. Kebijakan penerapan PHBM di Pulau Jawa yang saat ini masih ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perum Perhutani perlu ditetapkan oleh keputusan menteri kehutanan agar program ini lebih langgeng.
2. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dalam ketahanan pangan perlu diikuti dengan target pencapaian serta rencana operasional khususnya di Pulau Jawa. Pola

PHBM yang telah diterapkan dapat menjadi titik awal untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan. Pengembangan PHBM untuk meningkatkan kontribusi kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan perlu dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Daerah. 2009. Penyusunan Peta Kerawanan Pangan Jawa Barat. Draf Laporan Akhir. Bandung.
- Departemen Kehutanan, Direktorat Bina Hutan Kemasyarakatan, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (Bekerjasama dengan The Ford Foundation). 2001. Perkembangan Hutan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Barat. 2007. Data Penggunaan Kawasan Hutan Propinsi Jawa Barat. Bandung.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sukabumi. 2009. Laporan Tahunan. Sukabumi.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat. 2009. Database Tanaman Pangan. Bandung.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat. 2010. Draft Angka Tetap Palawija Tahun 2009. Bandung.
- F A O . 2 0 0 3 . T r a d e R e f o r m s A n d F o o d S e c u r i t y . <http://www.fao.org/docrep/005/y4671e>. Diakses tanggal 2 Desember 2010.
- FAO. 2010. Forests, Trees And Food Security. [www.fao.org/sd/ruralradio/ common /ecg](http://www.fao.org/sd/ruralradio/common/ecg). Diakses tanggal 1 Desember 2010.
- Hakim, I., Setiasih I., Sylviani. 2005. Rehabilitasi Lahan Dengan Pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Pulau Jawa: Studi Kasus di KPH Madiun dan KPH Kuningan. Prosiding Ekspose Hasil Litbang Hutan dan Konservasi Alam, hal 76 90. Bogor.
- Irawanti, S. 2009. Kelembagaan Kerjasama Pada Program PHBM Dalam Praktek Pengelolaan Hutan. Buku "Social Forestry Di Indonesia", hal 1 105. Penerbit Wicaksana Megacipta.
- Kementerian Kehutanan. 2010. Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014. [Http://dephut.go.id/](http://dephut.go.id/). Diakses tanggal 1 Desember 2010.
- PERDA Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2003 ttg Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Perum Perum Perhutani. 2001. Keputusan Dewan Pengawas Perum Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat. Jakarta.

Perum Perum Perhutani. 2010. Laporan Kemajuan Hasil Monev Implementasi PHBM. Bidang PHBM, Lingkungan dan PKBL Biro Kelola SDH s/d Juni 2010. KPH Sukabumi. Sukabumi.

Perum Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. 2010. Realisasi Dan Taksasi Produksi Tanaman Palawija. Bandung.